

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab V dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2012 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan, telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Sistem Pengendalian Intern (SPI) jika dibandingkan dengan tahun 2011, Tahun 2012 lebih baik terutama menyangkut koordinasi antara Dinas PPKAD dengan SKPD, juga antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam kaitan dengan Inventarisasi, Konfirmasi dan Rekonsiliasi terhadap temuan Tahun 2011.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2012 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana skala maupun bobot temuan pada tahun 2012, oleh BPK RI masih dianggap Wajar.
4. BPK RI memberikan “Opini Wajar Dengan Pengecualian” atas Neraca Pemerintahan Kabupaten Lembata, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan hal-hal yang dikecualikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Lembata belum mempertanggungjawabkan panjar sebesar Rp 798.589.610,00
- b. Sisa kas di bendahara pengeluaran berupa sisa UUDP TA 2005 dan 2006 sebesar Rp 1.046.517.276,00 tidak berupa kas lancar.
- c. Pemerintah Kabupaten Lembata belum melakukan inventarisasi dan konfirmasi kepada penerima dana bergulir
- d. Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan nilai penyertaan modal tanpa didukung dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.
- e. Pemerintah Kabupaten Lembata belum sepenuhnya melakukan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan diharapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Pemerintah Daerah diharapkan segera menyelesaikan panjar serta kas di bendahara pengeluaran yang tidak berupa kas lancar yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Terhadap temuan yang merupakan pokok-pokok kelemahan SPI Tahun 2012 perlu diperbaiki yaitu dengan segera melakukan inventarisasi dan konfirmasi kepada penerima dana bergulir dan inventarisasi aset tetap.

3. Pokok-pokok kelemahan terhadap kepatuhan perlu diperbaiki dan ditingkatkan dengan menyajikan nilai penyertaan modal berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno.2006. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)*. LPFE UI: Jakarta
- Arif, Bahtiar dkk. 2002. *Akuntansi Pemeritahan*. Salemba Empat. Jakarta
- Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan NTT. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2011. Tanggal 10 September 2012
- ,Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2012. Tanggal 06 September 2013
- Baridwan, Zaki.2004. *Intemediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, BPFE : Yogyakarta.
- Bastian, Indra.2007. *Audit Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Darise, Nurlan.2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Indeks : Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Keuangan.2002. *Standar Akuntansi Keuangan*.Salembat Empat : Jakarta.
- Mardiasmo.2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbbit Andi : Yogyakarta.
- Mulyadi.2002. *Auditing*. Salemba Empat : Jakarta.
- Nenommanu Yohanes. 2008. *Evaluasi dan Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Terhadap Temuan Audit BPK Atas LKPD Kabupaten Flores Timur TahunAnggaran 2008*. Universitas Widya Mandira. Kupang.

Pemerintah Kabupaten Lembata, *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012.*

-----*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2012,*
Tanggal 18 Maret 2013

----- *Laporan Keuangan Per 31 Desember 2012 (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan) .* Tanggal 28 Mei 2013.

-----, *Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lembata. 2012*

-----, *Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.*

-----, *Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun 2012;*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.*

-----, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

-----, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

-----, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Daerah.*

-----, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

- ,Peraturann Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, CV.Novindo Pustaka Mandiri : Jakarta.
- , PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- , PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2011Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2012
- ,PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, CV.Novindo Pustaka Mandiri : Jakarta.
- Sipahutar, Hottua. 2010. *Analisis Perubahan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2009*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung